

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta, Jakarta, 1980.
- Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary, V. Ed, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1979.
- Bodenheimer, Edgar et. al., An Introduction To the Anglo-American Legal System (Readings and Cases), West Publishing Co., St. Paul, Minnesota., U.S.A., 1988.
- David, Rene and Brierley, John E.C., Major Legal Systems in the World Today (An Introduction to the Comparative Study of Law), Stevens & Sons, London, 1985.
- Davies, F.R., Contract, Sweet & Maxwell, London, 1970.
- Dobbs, B. Dan, Tort and Compensation (Personal Accountability and Social Responsibility), West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1985.
- Emanuel, Steven and Knowles, Steven, Contracts, Emanuel Law Outlines Inc., Larchmont, New York, 1990.
- Floyd, Charles F., Real Estate Principles, Randon House Business Division, New York, 1981.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek-Buku Kesatu), Citra Adytia Bakti, Bandung, 1994.
- _____, Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek-Buku Kedua), Citra Adytia Bakti, Bandung, 1994.
- Djumaldi, F.X., Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harvey, W. Brian, The Law of Consumer Protection and Fair Trading, Ed. II, Butterworth, London, 1982.
- Jennings, Marianne M., Real Estate Law, Kent Publishing Company, Boston, 1985.
- Keaton, Page et. al., Cases and Materials On Tort and Accident Law, Ed. II, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota., 1989.

- Leder, M.J., Consumer Law, MacDonal and Evans, Estover, 1980.
- Ludes, J. Francis and Gilbert, J. Harold, Corpus Juris Secundum, West Publishing Co., St. Paul., Minnesota., 1952.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Bangunan (Perjanjian Pemborongan Bangunan), Liberty, Jogjakarta, 1982.
- _____, Himpunan Kayra tentang Pemborongan Bangunan, Liberty, Jogjakarta, 1982.
- _____, Hukum Perutangan (Bagian A), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
- _____, Hukum Perutangan (Bagian B), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
- Nieuwenhuis, J.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan D. Saragih, dicetak untuk kalangan sendiri, Surabaya, 1985.
- Panggabean, Henry P., Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Di Belanda), Liberty, Jogjakarta, 1991.
- Paton, G.W., A Text-book of Jurisprudence, Third Edition, Oxford University Press, London, 1964.
- Prosser, L. William and Wade, W. John, Cases and Materials on Torts, The Foundation Press Inc., Mineola, New York, 1971.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1988.
- Reich, Norbert and Mickliz, Hans W., Consumer Legislation In the EC Countries (A Comparative Analysis), Van Nostrnd Reinhold Company, Berkshire, 1980.
- Schiffman, G. Leon and Kanuk, Leslie Lazar, Consumer Behavior, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1987.
- Sjahdeini, Remi Sutan, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank Di Indonesia, Ikatan Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Subekti, R., Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, Hukum Pembuktian, Pradnya paramita, jakarta, 1987.

_____, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986.

Sutantio, Retnowulan dan Oeriphartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1986.

Tebbens, H. Duintjer, International Product Liability (A Study of Comparative and International Legal Aspect of Product Liability), Sijthoff & Noordhoff International Publishers, Alphen Ann Den Rijn, The Netherlands, 1980.

Wright, J. Christoper, Product Liability (The Law and Its Implications for Risk management), Blackstone Press Limited, London, 1989.

PERUNDANG-UNDANGAN

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), S. 1874-23.

Reglemen Indonesia yang diperbarui (Herziene Indonesische Reglement), S. 1941-44.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1/1946).

Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undng.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian hak Atas tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 54 Tahun 1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 03/KPTS/1991 tentang Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana Dengan Dukungan Fasilitas KPR.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/1989 tentang Ketentuan-ketentuan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) Dalam Mendukung Program Perumahan.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 04/KPTS/1989 tentang Pengadaan Kapling Siap Bangun dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan bank Tabungan negara.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 01/KPTS/1994 tentang Perubahan Surat Keputusan No. 05/KPTS/1993 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan KaplingSiap bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN).

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Tidak Bersusun.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/KPTS/1989 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Kapling Siap Bangun.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/1987 tentang Pengesahan 25 Standar Kontruksi Bangunan Indonesia Menjadi Standar Nasional Indonesia.

MAJALAH DAN SURAT KABAR

Airlangga, No. I/1985, Januari s/d April 1985

Forum Keadilan, No. 29 April 1991

Hukum dan Keadilan, No. 16 November-Desember 1980

Hukum dan Pembangunan, Desember 1986

Properti, No. 12 Januari 1995, No. 16 Mei 1995, No. 17 Juni 1995, No. 18 Juli 1995.

Tempo, No. 40 Th XXIII Desember 1993

Warta Konsumen, No. 201 Th. XVII Desember 1990, No. 194 Th. XVII Mei 1990

Yuridika, No. 5 Th. IX September - Oktober 1994

Jawa Pos, 2 November 1994 dan 14 November 1994

Suara Pembaruan, 29 Mei 1995

Surabaya Post, 3 Januari 1995.

LAIN-LAIN

Naskah Akademik RUU Perlindungan Konsumen, Tahun 1981 dan 1992.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan Usaha, Elips Project, Februari 1994.